

**PELAKSANAAN PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN
(Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)**

Linda Rizqy, Agus Suryono, Abdul Wachid

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: dila.rizqy@yahoo.co.id

Abstract: *The Implementation of Local Government Affair Service for Sea Communication Sector in Lamongan District (Study at Dinas Perhubungan, Lamongan District). Lamongan district is an autonomous region with a predominantly job as a fisherman. The implementation of sea communication cannot be separated with problems faced by the local government whith affects the quality of service given by them. Service of Pas Kecil and Sertifikat Kesempurnaan Kapal do not always follow standartd operational procedures because of limited supporting facilities. As an autonomous region whith has independency and authority it should be balanced with adequate resources*

Keywords: *local government, sea communication sector, Dinas Perhubungan*

Abstract: **Pelaksanaan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan Laut di Kabupaten Lamongan (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan).** Kabupaten Lamongan merupakan daerah otonom dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Pelaksanaan pelayanan perhubungan laut tidak lepas dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana pelayanan. Sehingga pengaruhnya berdampak pada hasil pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal tidak selalu dapat dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur karena keterbatasan suatu fasilitas pendukung. Seharusnya sebagai daerah otonom dengan kemandirian dan kewenangannya harusnya diimbangi dengan ketercukupinya suatu sumber daya.

Kata kunci: pemerintahan daerah, bidang perhubungan laut, Dinas Perhubungan

Pendahuluan

Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 negara berkewajiban melayani warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. pada dasarnya masyarakat selalu membutuhkan pelayanan dari suatu pemerintahannya. Jika dalam lingkup daerah maka pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun suatu penyelenggaraan pelayanan publik di era otoda juga tidak lepas dari suatu permasalahan.

Seharusnya dengan adanya otoda kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah mampu memperbaiki suatu pelayanan melalui keputusan berdasarkan kewenangan yang ada. Zen dkk (2006, h.77) mengungkapkan bahwa “Kebijakan otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan manajemen pengelolaan daerahnya secara profesional, termasuk dalam memberikan pelayanan publik

kepada masyarakat secara mudah, murah dan cepat” Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang terletak di sepanjang pesisir pantai utara (PANTURA) jawa yang memiliki pantai sepanjang 47 Km menjadikan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan sebanyak 15.099 jiwa, dengan jumlah armada tangkap ± 5.487 unit perahu (Gambaran Umum Kabupaten Lamongan, t.t).

Kondisi daerah Kabupaten Lamongan sebagai daerah penghasil tangkapan ikan dan mayoritas masyarakatnya adalah nelayan membutuhkan pelayanan bidang perhubungan laut untuk membantu para nelayan dalam melakukan aktivitasnya di laut. Salah satu pelayanan bidang perhubungan laut di Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal yang pada umumnya

dibutuhkan para nelayan untuk membantu kegiatan operasional di laut. Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan Pas Kecil adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. Sedangkan untuk Sertifikat Kesempurnaan Kapal (SKK), SKK adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.

Pelayanan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan juga tidak lepas dari suatu permasalahan dalam penyelenggaraannya. Pada dasarnya pelayanan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan memiliki Standar Operasional Prosedur. Namun pada pelaksanaannya, pelayanan tersebut tidak selalu berjalan sesuai standar tersebut. Dimana dalam Sertifikat Kesempurnaan Kapal diperlukan pihak dinas untuk melakukan pemeriksaan kapal namun tidak selalu dapat dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan karena keterbatasan fasilitas pendukung.

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan manajemen pengelolaan daerahnya secara profesional, termasuk dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat yang diungkapkan oleh Zen dkk (2006, h.77). Namun, kemampuan kelembagaan suatu organisasi dilihat dari sisi ketersediaannya sarana dan prasarana yang dimiliki ikut mempengaruhi proses kegiatan aparatur pemerintah daerah dalam memberikan suatu pelayanan pula.

Mengingat daerah Kabupaten Lamongan yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan, dimana kegiatan atau aktivitasnya tidak lepas dari suatu kegiatan operasional di laut diperlukan suatu pelayanan oleh instansi pemerintah daerah yang terkait yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang mempunyai kondisi keterbatasan sarana dan prasarana bagi para aparatur dalam memberikan suatu pelayanan yang seharusnya dengan kemandirian daerah sebagai daerah otonom ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan dalam memberikan suatu pelayanan.

Tinjauan Pustaka

A. Birokrasi Pemerintahan Daerah

Pengertian birokrasi secara singkat menurut Thoha dalam Saleh, “birokrasi adalah suatu

tatanan yang sistematis dan hierarkis yang menekankan adanya kerja rasional, impersonal, dan legalistik” (2009, h.33). Sedangkan pengertian pemerintahan daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Birokrasi pemerintah daerah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat tidak lepas dari suatu interaksi sosial dengan pelaku-pelaku yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah daerah yaitu masyarakat, pegawai atau pelaku birokrasi dan aktor-aktor lain yang bersangkutan. Organisasi birokrasi pemerintah daerah sebagai produsen sekaligus penyedia atau pengatur pelayanan dan masyarakat di daerah adalah penerima pelayanan atau konsumen. Dalam interaksi tersebut terdapat kemampuan organisasi birokrasi pemerintah daerah sebagai produsen dan penyedia layanan dan masyarakat sebagai konsumen yang merasakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan sekaligus sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, diungkapkan oleh Saleh (2009, h.151-156)

Saleh menambahkan, Manakala masyarakat merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan maka suatu keberhasilan bagi birokrasi, begitu juga sebaliknya jika masyarakat merasa tidak terpuaskan atas pelayanan yang diberikan maka hal tersebut sebagai suatu kegagalan dari birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan (2009, h.156). Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang tidak diperbolehkan. Urusan pemerintahan daerah ada 2 yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

B. Konsep Pelayanan Publik

“Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna, pengguna yang dimaksudkan disini adalah warganegara yang membutuhkan pelayanan publik” (Dwiyanto, 2008, h.136).

Untuk menjalankan suatu pelayanan publik maka ada penyelenggara publik yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik tersebut. Penyelenggara pelayanan publik adalah suatu lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta

yang berkewajiban melaksanakan pelayanan publik.

Suatu pelaksanaan pelayanan publik harus didasari dengan asas-asas pelayanan publik agar dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan. Adapun asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara lain:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Kondisional
- d. Partisipatif
- e. Kesamaan hak
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Pelayanan publik diselenggarakan guna mencukupi kebutuhan warga Negara. Sehingga suatu pelayanan publik harus memiliki indikator kualitas pelayanan yang jelas untuk memenuhi standar pelayanan yang baik. Menurut Amy.Y.S. Rahayu dalam Zen (2006, h.77) Indikator kualitas pelayanan konsumen ada 5 dimensi:

- a. *Tangibles*
- b. *Realibility*
- c. *Responsiveness*
- d. *Assurance*
- e. *Emphaty*.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki pedoman sebagai acuan untuk melaksanakannya, baik bagi penyedia layanan maupun bagi pengguna layanan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik BAB V standar penyelenggaraan publik terdiri dari:

- a. Prosedur Pelayanan
- b. Waktu Penyelesaian
- c. Biaya Pelayanan
- d. Produk Pelayanan
- e. Sarana Dan Prasarana
- f. Kompetensi Petugas.

Menurut Eko Prasjo dalam Puspitosari (2012, h.128) Persoalan pelayanan publik di Indonesia secara singkat terdiri dari:

- a. Paradigma pelayanan publik dan mentalitas aparat
- b. Kualitas pelayanan tidak memadai dan masih diskriminatif
- c. Belum ada regulasi yang memadai.
- C. Pelaksanaan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan Laut di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan**

Pelayanan bidang perhubungan laut yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan diberikan melalui subbidang perhubungan laut yang memiliki tugas

tersendiri dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Sub bidang beserta pelayanan yang diberikan tersebut antara lain adalah:

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Bidang lalu lintas dan angkutan laut memberikan bentuk pelayanan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas dan operasional angkutan laut di Kabupaten Lamongan. dimana pelayanan yang diberikan dalam sub bidang ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal
- b. Patroli Laut

2. Bidang Keselamatan Pelayaran

Bidang keselamatan pelayaran memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan keselamatan pelayaran. pelayanan tersebut antara lain adalah:

- a. Pembinaan Teknis Keselamatan Pelayaran (Program Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2013, 2013).

Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan bagaimana pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan laut di Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan secara sistematis dan faktual di tempat penelitian. Oleh karena itu jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sehingga dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka data fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan laut di Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, meliputi:
 - a. Penerbitan izin Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal
 - b. Patroli laut
 - c. Pembinaan teknis keselamatan pelayaran
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan laut di Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
 - a. faktor pendukung
 - 1) Pendukung internal
 - 2) Pendukung eksternal
 - 3)

b. faktor penghambat

- 1) Penghambat internal
- 2) Penghambat eksternal

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lamongan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lamongan adalah daerah penghasil tangkapan ikan dengan mayoritas masyarakatnya adalah nelayan sedangkan situs penelitian yang diambil adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang beralamatkan JL. Jaksa Agung Suprpto No 39 Lamongan sebagai situs penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat-alat penunjang dan catatan lapangan. analisis data yang digunakan adalah analisa data menurut pendapat Matthew B. Miles & A. Michael Huberman yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (1992, h.15-21). Ketiga alur kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Reduksi data
- 2) Penyajian data
- 3) Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan Laut di Kabupaten Lamongan yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

a. Penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal

Dasar hukum dalam pelaksanaan ini yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2004. Dalam penelitian ini pelaksanaan pelayanan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan digambarkan melalui beberapa aspek, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan adalah syarat-syarat yang harus dimiliki peminta layanan untuk mendapatkan suatu pelayanan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2005 Bab III Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan beberapa per-

syarat yang harus dilengkapi oleh pemohon penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal yang dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal (SKK) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), pemilik kapal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk baru/pertama kali harus dilampiri:
 - a. Untuk mendapatkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil):
 - 1) Fotokopi KTP, yang masih berlaku;
 - 2) Surat Kepemilikan Kapal dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 - 3) Fotokopi Sertifikat Kesempurnaan Kapal;
 - b. Untuk Sertifikat Kesempurnaan Kapal:
 - 1) Fotokopi KTP, yang masih berlaku;
 - 2) Fotokopi Akta Kelahiran/Identitas perorangan;
 - 3) Surat Kepemilikan Kapal dari Desa/Kelurahan setempat;
 - 4) Data fisik konstruksi bangunan kapal;
 - 5) Data tahun pembuatan kapal;
 - 6) Daftar peralatan dan kebendaan yang berada dalam kapal; Daftar nahkoda dan anak buah kapal;

Dari penjelasan peraturan tersebut, maka oleh pihak dinas perhubungan tersebut dibuatlah suatu ketentuan persyaratan dalam pelayan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal. Persyaratan yang ditentukan antara lain adalah:

1. Surat pengajuan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas
2. fotokopi KTP
3. Surat kepemilikan kapal dari Kepala Desa atau Lurah
4. Surat ukur kapal

2) Prosedur pelayanan

Standar operasional prosedur pelayanan penerbitan Pas Kecil dan SKK terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan persyaratan
- 2) Pemeriksaan berkas oleh pegawai
- 3) Pemeriksaan atau pengukuran fisik atau survei lapangan terhadap kapal.
- 4) Pengolahan data survei lapangan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.
- 5) Jika kondisi fisik kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar maka langkah

- terakhir adalah penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal
- 6) Pengajuan penandatanganan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Laut dan Angkutan Laut dan Kepala Bidang Perhubungan Laut
 - 7) Penandatanganan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal atas nama Bupati Lamongan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Sedangkan dalam suatu pelaksanaannya, prosedur penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sedikit berbeda dengan standar yang telah ditetapkan. Dimana dalam pelaksanaannya, pemohon layanan dapat mengajukan layanan melalui perantara ketua rukun nelayan setempat dan pengukuran tidak dilaksanakan oleh pegawai namun dilakukan pengukuran sendiri oleh pemohon serta ketua rukun nelayan.

Tetapi ada pula ketika pemohon layanan adalah pemohon yang secara langsung mengajukan layanan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan meminta pihak dinas untuk melakukan pemeriksaan kapal. Namun, hal tersebut sangat jarang ditemui karena kebanyakan pemohon layanan atau masyarakat mengajukan permohonan melalui ketua rukun nelayan dan jumlahnya pemohonnya sangat banyak. Sehingga suatu pemeriksaan kapal oleh pihak dinas tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan suatu fasilitas pendukung untuk menjangkau masyarakat di lapangan.

3) Biaya pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan masyarakat peminta layanan penerbitan pas kecil dan sertifikat kesempurnaan kapal, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan tidak lagi memberikan ketentuan biaya kepada masyarakat pemohon layanan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal sejak tahun 2011.

4) Waktu pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber, penyelesaian pelayanan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dilakukan dalam waktu tiga hari sampai dengan satu minggu baik itu Pas Kecil maupun Sertifikat Kesempurnaan Kapal. Sedangkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2005 pasal 7 menyebutkan bahwa:

1. Selambat-lambatnya 3 hari sejak diterimanya permohonan surat tanda kebangsaan kapal (Pas Kecil), dinas harus sudah mengambil keputusan;

2. Selambat-lambatnya 14 hari sejak diterima permohonan Sertifikat Kesempurnaan Kapal, dinas harus sudah mengambil keputusan;

b. Patroli Laut

Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, memberikan pengertian dan pengarahan tentang kelengkapan dokumen/surat kapal, kelengkapan keselamatan pelayaran, serta peringatan apabila melanggar peraturan. Patroli laut dilaksanakan dalam 5 (lima) kali kegiatan, yaitu pelaksanaan pada tanggal 24 September, 08 Oktober, 23 Oktober, 29 Oktober, Dan Berakhir Pada Tanggal 6 November 2013. Tahap pelaksanaan dimulai dengan adanya rapat koordinasi patroli laut, pemantapan kondisi teknis dan pemahaman kegiatan patroli laut, persiapan pembekalan, dan pelaksanaan patroli laut.

Sasaran dari kegiatan ini adalah para nelayan yang mempunyai kapal berukuran kurang dari atau dibawah 7 GT (gross tonage) yang sudah ditentukan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2005 BAB III Tentang Ketentuan Operasional Kapal Pasal 2 .

c. Pembinaan Teknis Keselamatan Pelayaran

Pembinaan teknis keselamatan pelayaran adalah kegiatan pengarahan kepada para nelayan untuk memberitahu pentingnya suatu keselamatan pelayaran. Kegiatan ini memberitahu dan mengarahkan para nelayan maupun pemilik kapal untuk memahami dan menyadarkan mereka akan pentingnya suatu kelengkapan pelayaran demi keselamatan pelayaran. Dalam kegiatan ini dilakukan selama satu bulan sekali dengan menyesuaikan kondisi pegawai.

Pembinaan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dilakukan secara informal artinya kegiatan ini dilakukan atas inisiatif mereka sendiri tanpa melibatkan instansi-instansi terkait. Pembinaan dilakukan secara sederhana dengan cara mendatangi para kumpulan nelayan di tempat pangkalan pendaratan ikan. Pembinaan teknis keselamatan pelayaran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran. Karena kegiatan tersebut membutuhkan beberapa anggaran untuk merealisasikannya sehingga pembinaan yang dilakukan diberikan secara sederhana layaknya penyuluhan tentang keselamatan pelayaran.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung

1) Adanya Kerjasama Antar Pegawai

Kerjasama dilakukan antar pegawai terutama pegawai bidang perhubungan laut yang hanya memiliki 3 pegawai dan 1 kepala bidang. Kerjasama dilakukan antar pegawai karena masing-masing dari sub bidang perhubungan laut hanya di pegang oleh satu orang pegawai dan tidak memiliki staf dibawahnya. Kerjasama dilakukan untuk membantu antar pegawai dalam melaksanakan suatu tugas untuk memberikan suatu pelayanan.

2) Adanya Komitmen Pegawai

Komitmen pegawai ditunjukkan ketika dihadapkan dengan keterbatasan fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan pelayanan. Kondisi keterbatasan tersebut lantas tidak menghentikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Ketika dihadapkan dengan suatu keterbatasan, pegawai tetap mengusahakan bagaimana pelayanan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan caranya sendiri. Ketika masyarakat meminta adanya pemeriksaan kapal, maka karena keterbatasan fasilitas pendukung seperti kendaraan dinas, maka pegawai berusaha melakukan permintaan masyarakat dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Komitmen juga ditunjukkan ketika akan diadakannya suatu pembinaan teknis keselamatan pelayaran yang terhambat oleh keterbatasan anggaran, maka pegawai berusaha melaksanakan kegiatan tersebut atas inisiatif sendiri meskipun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sesuai rencana yang membutuhkan anggaran yang cukup.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Anggaran

Karena keterbatasan anggaran suatu pembinaan teknis keselamatan pelayaran yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya pelaksanaan pembinaan teknis keselamatan pelayaran dilakukan secara sederhana atas inisiatif pegawai sendiri dengan cara mendatangi para kumpulan nelayan di tempat-tempat pendaratan ikan.

2) Keterbatasan Fasilitas Pendukung

Karena keterbatasan suatu kendaraan dinas, penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal tidak dapat selalu dilakukan pemeriksaan kapal. Jika pemohon dilakukan melalui ketua rukun nelayan, maka

pemeriksaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Namun ketika pemohon meminta untuk dilakukan pemeriksaan kapal oleh pegawai dinas, maka pegawai tetap mengusahakan dengan keterbatasan yang ada.

3) Kurangnya Kerjasama Dari Pihak Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat tersebut ditunjukkan ketika pegawai telah tiba di lapangan untuk melakukan pemeriksaan kapal, pemohon atau masyarakat peminta layanan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal tidak ada di tempat lapangan pemeriksaan kapal, bahkan mungkin sulit untuk dihubungi. sehingga hal tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian layanan sedikit terlambat. Kurang bisa diajak kerajasamanya masyarakat untuk merespon suatu keadaan ketika akan diadakannya pemeriksaan kapal.

4) Kurangnya Koordinasi Dalam Proses Layanan

Ketidakpastian waktu yang tepat dalam mengkoordinasikan waktu pemeriksaan kapal di lapangan mempengaruhi lambatnya proses penyelesaian penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal. Ketika akan diadakannya pemeriksaan kapal di lapangan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dimana pegawai yang bertugas telah tiba di lokasi pemeriksaan kapal, namun yang terjadi adalah kapal yang hendak di periksa tidak ada di tempat dan hal tersebut menyebabkan proses pemeriksaan terlambat.

Kesimpulan

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melalui bidang perhubungan laut di Kabupaten Lamongan terdiri dari penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal, kegiatan patroli laut, dan pembinaan teknis keselamatan pelayaran.

Pelaksanaan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal secara keseluruhan masih belum bisa dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, terutama untuk Sertifikat Kesempurnaan Kapal yang dalam langkahnya terdapat suatu pemeriksaan kapal. Namun hal tersebut masih belum bisa dilakukan karena keterbatasan suatu fasilitas pendukung berupa kendaraan dinas. Tetapi ketika masyarakat meminta untuk diadakannya suatu pemeriksaan

kapal maka pihak dinas perhubungan kabupaten lamongan tetap mengusahakan hal tersebut dengan berbagai keterbatasan yang ada.

Pelaksanaan patroli laut dilakukan dalam lima kali kegiatan dalam jangka waktu satu tahun. dimana pelayanan tersebut memberikan arahan dan pembinaan bagi para nelayan akan pentingnya suatu dokumen-dokumen dan kelengkapan kapal.

Sedangkan untuk pembinaan teknis keselamatan pelayaran dilakukan secara sederhana atas inisiatif pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan layaknya penyuluhan. Pada awalnya rencana kegiatan pembinaan teknis keselamatan pelayaran membutuhkan anggaran yang cukup untuk

merealisasikannya. Namun karena keterbasannya maka pembinaan teknis keselamatan pelayaran dilakukan secara sederhana dengan cara mendatangi para kumpulan nelayan di tempat-tempat pendaratan ikan.

Adapun kondisi-kondisi yang mampu membantu jalannya pelaksanaan pelayanan antara lain adalah adanya kerjasama antar pegawai dan terciptanya komitmen pegawai yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan. Sedangkan keadaan-keadaan yang bersifat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pelayanan terdiri dari keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat, dan kurangnya koordinasi dalam proses pelaksanaan pelayanan.

Daftar Pustaka

- Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan (2013) **Program Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan**. Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.
- Dwiyanto, Agus. (2008) **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik**, Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Miles, Matthew. B Dan A. Michael Huberman. (1992) **Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru**. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Pemkab Lamongan (n.d) **Gambaran Umum Kabupaten Lamongan**. [Internet], Lamongan, Pemkab Lamongan. Available from: <www.lamongankab.go.id/> [accessed 27th February 2014.]
- Puspitosari, Hesti. (2012) **Filosofi Pelayanan Publik, Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigm Pelayanan Publik**. Malang, Setara Press.
- Saleh, Kausar Ali. (2009) **Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah Dalam Bayang-Bayang Budaya Patrokliden**. Bandung, ALUMNI.
- Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik** (c.1) Jakarta, Presiden Republik Indonesia.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah** (c.1) Jakarta, Presiden Republik Indonesia.
- Undang-undang nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan** (c.1) Jakarta, Presiden Republik Indonesia.
- Zen, A. Patra M, dkk. (2006) **Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik**. Malang, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi.